

KONSEP DAN PRAKTIK MANAJEMEN PADA MASA BANI Umayyah

Padlianor^{1*}, Muhammad Ibrahim Ash-Shiddieqy², Suraijiah³

UIN Antasari, Banjarmasin, Indonesia¹²³

Email: padlianor123@gmail.com¹, ibrahimash99@gmail.com², suraijiah@uin.antasari.ac.id³

Keywords

*Bani Umayyah
Manajemen
Administrasi Islam
Desentralisasi*

Abstrak

This research analyzes the concept and practice of management during the Umayyad Caliphate (661-750 AD), a crucial period in Islamic history. The dynasty established a vast empire from Spain to India, supported by an effective administrative and governmental management system. Muawiyah ibn Abi Sufyan, the first caliph, played a central role in developing an organized bureaucracy, military management, and an emphasis on justice and security. Yazid ibn Muawiyah's reign continued efforts for political stability despite internal conflicts like the Karbala tragedy. Muawiyah ibn Yazid also contributed to socio-political stability and moderate state financial management. Umayyad government management advanced significantly by establishing various diwans (departments/offices) for military, finance, and postal affairs. The decentralization of power to governors reflected principles of division of labor and placing the right person in the right place. The legacy of Umayyad management, including structured administration and bureaucracy, remains relevant today in regional autonomy concepts and modern management principles.

*Umayyad Caliphate
Management
Islamic
Administration
Decentralization*

Penelitian ini menganalisis konsep dan praktik manajemen pada masa Bani Umayyah (661-750 M), periode krusial dalam sejarah Islam. Dinasti ini berhasil membangun imperium luas dari Spanyol hingga India, didukung sistem administrasi dan manajemen pemerintahan efektif. Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama, berperan sentral dalam mengembangkan birokrasi terorganisir, pengelolaan militer, serta penekanan pada keadilan dan keamanan. Masa Yazid bin Muawiyah melanjutkan upaya stabilitas politik meskipun diwarnai konflik internal seperti tragedi Karbala. Muawiyah bin Yazid juga berkontribusi pada stabilitas sosial politik dan pengelolaan keuangan negara yang moderat. Secara umum, manajemen pemerintahan Bani Umayyah berkembang pesat dengan pembentukan berbagai diwan (lembaga/kantor urusan) seperti militer, keuangan, dan pos. Desentralisasi kekuasaan kepada gubernur mencerminkan prinsip pembagian kerja dan penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Warisan manajemen Bani Umayyah, termasuk administrasi terstruktur dan birokrasi, relevan hingga saat ini dalam konsep otonomi daerah dan prinsip manajemen modern

1. PENDAHULUAN

Kekhalifahan Bani Umayyah (661-750 M) merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Islam. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah berhasil membangun sebuah imperium yang luas, membentang dari Spanyol hingga India (Maulidan, 2024). Keberhasilan ekspansi ini tidak hanya didukung oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh sistem administrasi dan manajemen pemerintahan yang efektif (Hitti, 2006). Kompleksitas pengelolaan wilayah yang sangat luas dan beragam budaya menuntut adanya inovasi dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, militer, dan birokrasi.

Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama kira-kira 90 tahun, yang mencakup periode hampir satu abad, dan dipimpin oleh 14 khalifah (Tinianus 2021: 179). Di antara para khalifah tersebut, beberapa dikenang karena kebijakan dan keputusan mereka yang dianggap menyejahterakan masyarakat pada masa itu, meliputi: a) Muawiyah bin Abi Sufyan, b) Abdul Malik bin Marwan, c) Al-Walid bin Abdul Malik, serta d) Umar bin Abdul Aziz.” (Hidayatulloh, Ridwan, dan Khusnuddin, 2023).

Perkembangan manajemen pada masa ini mengalami stagnasi, sebuah kondisi yang disebabkan oleh persoalan politik di kalangan elit sahabat Nabi (Basri. 2020). Perselisihan politik tersebut selanjutnya memicu timbulnya berbagai pemberontakan terhadap pemerintahan Bani Umayyah, di antaranya yang dilakukan oleh kaum Khawarij dan Bani Abbasiyah (Tanjung dkk. 2023:15).

Perkembangan peradaban pada masa Bani Umayyah seringkali dikaitkan dengan kemajuan di bidang arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan (Zein, 2022). Namun, studi mengenai konsep dan praktik manajemen pada masa ini juga tak kalah penting. Memahami bagaimana Bani Umayyah mengatur pemerintahan, mengelola sumber daya, dan menghadapi berbagai tantangan dapat memberikan pelajaran berharga bagi konteks modern (Lapidus 2014:56). Manajemen pemerintahan yang baik adalah kunci keberlangsungan sebuah negara, (Rusdiono, 2018) dan Bani Umayyah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, memberikan contoh historis yang menarik untuk dikaji.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek-aspek tertentu dari pemerintahan Bani Umayyah, seperti sistem perpajakan (Lestari, 2020). perkembangan birokrasi (Arifin, 2022), dan kebijakan ekonomi (Hakim, 2019). Namun, masih diperlukan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai konsep dan praktik manajemen secara keseluruhan. Penelitian ini penting untuk memberikan

gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana Bani Umayyah berhasil mengelola negara dan apa saja warisan manajemen yang ditinggalkannya. Lebih jauh, studi ini juga relevan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip manajemen yang bersumber dari ajaran Islam diterapkan dalam konteks pemerintahan yang nyata (Rahman 2021:112).

Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis konsep serta praktik manajemen pada zaman Bani Umayyah. Dengan memahami fondasi manajemen pemerintahan pada masa tersebut, diharapkan kita dapat memperoleh wawasan yang lebih kaya mengenai perkembangan administrasi negara dalam sejarah Islam, serta relevansinya bagi tantangan manajemen pemerintahan di masa kini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis konsep serta praktik manajemen pada zaman Bani Umayyah. Kemudian pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kajian pustaka (*library research*) atau studi literatur. Data dikumpulkan melalui penelusuran dan analisis dokumen-dokumen tertulis, seperti catatan sejarah, buku-buku, dan artikel-artikel yang membahas tentang Kekhalifahan Bani Umayyah, khususnya terkait aspek administrasi dan manajemen pemerintahan mereka.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan praktik manajemen yang diterapkan pada masa Bani Umayyah. Analisis juga mencakup perbandingan praktik manajemen di era Bani Umayyah dengan prinsip-prinsip manajemen modern. Artikel ini menyoroti peran khalifah seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, dan Muawiyah bin Yazid dalam mengembangkan sistem birokrasi, militer, keuangan, dan keadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Bani Umayyah

Kemunculan Dinasti Umayyah berawal dari gejolak yang melanda umat Muslim di penghujung kepemimpinan Ali bin Abi Thalib (Setiawan 2020). Pada masa itu, umat Muslim terbelah menjadi tiga kekuatan politik utama, yaitu Syiah (pendukung Ali), kubu Muawiyah, dan Khawarij. Perpecahan ini sangat merugikan posisi Ali karena melemahkan kekuatannya, sementara Muawiyah justru semakin menguat. Situasi ini

memuncak ketika Ali dibunuh oleh kelompok Khawarij pada tahun 40 H (660 M) (Rachman 2018).

Nama Dinasti Umayyah diambil dari Umayyah bin Abd Syams bin Abdu Manaf, seorang figur penting dari suku Quraisy pada masa Jahiliah yang sering terlibat dalam persaingan kekuasaan dengan pamannya, Hasyim bin Abdu Manaf (Harahap, 2020). Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb, yang juga menjabat sebagai khalifah pertamanya. Sebagai langkah awal pemerintahannya, Muawiyah memindahkan ibu kota yang semula berlokasi di Kufah ke Damaskus (Rahmadi 2018). Muawiyah dianggap sebagai peletak dasar dinasti ini, meskipun perolehannya atas kekuasaan lewat perang saudara di Shiffin dipandang negatif oleh sebagian sejarawan. Terlepas dari kontroversi tersebut, Muawiyah dikenal memiliki sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator (Setiawan 2020).

Fondasi keberhasilan Muawiyah membangun Dinasti Umayyah terletak pada "basis rasional" yang solid untuk masa depan yang telah ia persiapkan sejak awal, bukan semata-mata hasil kemenangan di Shiffin atau kematian Ali bin Abi Thalib (Syauqi 2016:35). Ia juga sangat terbantu oleh dukungan kuat dari wilayah Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Selain itu, Muawiyah dikenal sebagai administrator yang sangat cakap dalam menunjuk pejabat-pejabatnya dan memiliki kapabilitas luar biasa sebagai negarawan. (Samsul Munir Amin 2024:119)

Muawiyah, pendiri Dinasti Umayyah, awalnya dinilai negatif oleh banyak sejarawan. Tuduhan muncul karena ia meraih legitimasi kekuasaan secara curang di Perang Shiffin dan mengubah sistem kepemimpinan yang dipilih menjadi monarki turun-temurun, dianggap mengkhianati prinsip Islam. (Ummatin 2021:73) Meski begitu, Muawiyah diakui memiliki bakat sebagai penguasa, politikus, dan administrator. Dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun (661-750 Masehi) dengan 14 khalifah, dimulai dari Muawiyah hingga Marwan bin Muhammad. (Hidayatulloh dkk. 2023)

B. Konsep dan Praktik Manajemen pada Masa Kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan

Istilah manajemen umum digunakan dalam setiap bentuk kerja sama tim atau organisasi yang melibatkan banyak individu (Tampubolon, 2020). Manajemen dapat dimaknai dalam berbagai cara, yakni sebagai seni dalam mengatur kolaborasi, sebagai bidang ilmu pengetahuan, atau sebagai posisi kepemimpinan dalam suatu unit atau lembaga. (Basri 2020)

Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagai khalifah pertama dari dinasti Umayyah, memainkan peran penting dalam membangun dan menyusun konsep serta praktek manajemen yang menjadi landasan bagi pemerintahan Bani Umayyah. Masa kepemimpinannya (661-680 M) tidak hanya menandai peralihan kekuasaan dari pemerintahan khulafaurrasyidin ke Umayyah, tetapi juga pengembangan sistem administrasi dan manajemen yang lebih terstruktur, yang mencakup aspek politik, militer, dan keadilan. Beberapa elemen penting dalam konsep dan praktek manajemen pada masa Muawiyah dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Birokrasi yang Terorganisir

Muawiyah bin Abi Sufyan dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan administrasi dan birokrasi dalam pemerintahannya (Bestari 2024). Ia membangun struktur administratif yang efisien dengan mengangkat pejabat-pejabat yang kompeten dan dapat dipercaya. Salah satu kebijakan pentingnya adalah penunjukan gubernur-gubernur yang berkompeten di setiap wilayah yang ditaklukkan, yang tidak hanya mengatur urusan politik, tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat setempat (Wahidah 2025:7). Gubernur ini harus memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh khalifah dijalankan dengan baik di daerah masing-masing.

2. Pengelolaan Militer dan Penguatan Pertahanan

Pada masa Muawiyah, manajemen militer juga mendapatkan perhatian besar. Sebagai seorang mantan panglima perang yang berpengalaman, Muawiyah berhasil membangun kekuatan militer yang sangat solid dan terorganisir dengan baik (Chodijah 2024). Ia mengatur dan mengelola pasukan dengan memanfaatkan sistem komando yang jelas, serta memberi penghargaan yang layak kepada prajurit. Muawiyah juga memimpin sejumlah ekspansi militer untuk memperluas wilayah kekuasaannya, baik di wilayah Timur (menghadapi Bizantium) maupun di wilayah Barat (Afrika Utara dan Spanyol) (Maulidan 2024)

Manajemen pasukan yang terkoordinasi dengan baik ini, serta pengaturan logistik yang mendukung mobilitas militer, menjadi bagian integral dari kekuatan pemerintahan Umayyah yang stabil.

3. Penerapan Prinsip Keadilan dan Keamanan

Muawiyah juga memperkenalkan kebijakan yang memprioritaskan keamanan dan keadilan. Ia menjaga kestabilan politik dalam kerajaan dengan menjaga ketertiban sosial dan menanggulangi perpecahan internal. Meskipun pemerintahan Umayyah sering dianggap otoriter, Muawiyah berusaha menjaga agar kebijakan pemerintahannya tidak terlalu menindas rakyat dengan membangun sistem pengawasan yang tidak terlalu represif, tetapi cukup untuk mencegah pemberontakan (Safitri 2024)

Muawiyah sangat menerapkan sekali prinsip keadilan, yang mana tidak semua pemimpin bisa menerapkan ini pada zaman sekarang. Dan pemimpin yang adil ini sangat mendapat keutamaan, sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ

Tujuh orang yang akan dinaungi Allah pada hari yang tiada naungan selain naungan-Nya (1) Seorang imam yang adil (HR. Bukhari no. 660, 1423, 6479, 6806 dan Muslim 1031)

Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, konsep dan praktek manajemen pemerintahan telah berkembang dengan penerapan sistem administratif yang lebih terorganisir, sistem keuangan yang efisien, pengelolaan militer yang kuat, dan diplomasi yang cerdas. Muawiyah berhasil membangun fondasi pemerintahan yang memberi dampak jangka panjang terhadap perkembangan kekhalifahan Umayyah dan pengelolaan negara secara umum. Praktik manajemen ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan kekuatan militer selama periode kekuasaan Bani Umayyah.

C. Praktik Manajemen pada Masa Kepemimpinan Yazid bin Muawiyah

Yazid bin Muawiyah, yang memerintah dari tahun 680 hingga 683 M, merupakan khalifah kedua dari dinasti Umayyah. Masa pemerintahannya menjadi periode yang penuh dengan kontroversi dan peristiwa besar dalam sejarah Islam, seperti tragedi Karbala yang menyebabkan kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad Saw (Febrianti 2020). Namun, di luar peristiwa-peristiwa tersebut, pemerintahan Yazid juga menunjukkan beberapa aspek penting terkait dengan konsep dan praktek manajemen yang diterapkan pada masa tersebut:

1. Konsep Kepemimpinan dan Pemerintahan

Pemerintahan Yazid bin Muawiyah, meskipun mengalami tantangan politik internal, berusaha melanjutkan dan memperkuat sistem pemerintahan yang telah dibangun oleh ayahnya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Konsep kepemimpinan yang diterapkan oleh Yazid berfokus pada stabilitas politik dan pengelolaan wilayah kekuasaan yang luas, yang meliputi sebagian besar dunia Islam pada waktu itu.

2. Pembinaan Sosial dan Keagamaan

Pada masa Yazid, pembinaan sosial dan keagamaan dilakukan untuk menjaga keharmonisan di masyarakat. Namun, sebagian besar kebijakan yang diterapkan lebih berfokus pada penguatan kekuasaan politik. Meskipun demikian, beberapa tindakan sosial yang diambil di bawah pemerintahan Yazid berupaya untuk meredakan ketegangan antar kelompok, meskipun pada akhirnya lebih banyak diwarnai oleh konflik internal yang cukup besar.

3. Praktek Manajemen dalam Pengelolaan Konflik

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Yazid dalam masa pemerintahannya adalah bagaimana mengelola ketegangan politik yang muncul, terutama dari kelompok-kelompok yang menentang kekuasaannya. Salah satu peristiwa yang paling berpengaruh adalah tragedi Karbala, di mana Yazid mengirimkan pasukan untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Husain bin Ali.

Tragedi Karbala ini menandai konflik besar antara pihak yang mendukung pemerintahan Umayyah dan mereka yang menuntut perubahan dalam sistem kepemimpinan. Meskipun peristiwa ini merupakan kekalahan besar bagi pihak Yazid, namun manajemen Krisis yang dilakukannya menunjukkan bagaimana beliau berusaha mempertahankan kekuasaannya melalui tindakan yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai langkah represif.

Sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan menegaskan legitimasi, Yazid melakukan berbagai tindakan yang dapat dikatakan sebagai manajemen politik yang keras, termasuk mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan. Namun, keberhasilan kebijakan ini dalam mempertahankan stabilitas politik sering dipertanyakan, mengingat perlawanan yang muncul dari kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan kekuasaannya.

Kita sebagai kaum muslim dianjurkan untuk menghindari konflik atau pertikaian, karna permasalahan yang besar sebaiknya diperkecil dan permasalahan kecil sebaiknya

dihilangkan. Dan bahkan ada yang berdusta diperbolehkan dalam perkara mendamaikan saudaranya, sebagaimana dalam hadis:

أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ يَقُولُ « لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنِمِّي خَيْرًا ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ الْحَرْبُ وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

Ummu Kultsum binti 'Uqbah bin 'Abi Mu'aythin, ia di antara para wanita yang berhijrah pertama kali yang telah membaiat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ia mengabarkan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan dia antara pihak yang berselisih di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik (demi mendamaikan pihak yang berselisih)." Ibnu Syihab berkata, "Aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada tiga perkara, "Peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami (dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga)." (HR. Bukhari no. 2692 dan Muslim no. 2605, lafazh Muslim).

Masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah menunjukkan berbagai aspek dalam penerapan manajemen pemerintahan pada periode Bani Umayyah. Meskipun menghadapi tantangan besar dalam hal stabilitas politik dan konflik internal, Yazid berusaha untuk menjaga kekuasaan melalui kebijakan militer yang kuat, pengelolaan ekonomi yang stabil, serta penguatan birokrasi. Namun, peristiwa-peristiwa besar, seperti tragedi Karbala, menunjukkan bahwa praktek manajemen politik pada masa Yazid juga melibatkan keputusan-keputusan yang kontroversial dan berujung pada pembagian besar dalam masyarakat Islam pada masa itu.

D. Praktik Manajemen pada Masa Kepemimpinan Muawiyah bin Yazid

Pada masa Bani Umayyah, khususnya pada masa pemerintahan Muawiyah bin Yazid, manajemen pemerintahan dan politik mengalami perubahan signifikan yang memberi pengaruh besar terhadap struktur negara dan administrasi. Muawiyah bin Yazid, yang memerintah dari tahun 683 hingga 684 M, meskipun hanya memerintah dalam waktu yang singkat, memegang peranan dalam penerapan konsep dan praktik manajerial dalam pemerintahan. Berikut adalah beberapa konsep dan praktik manajemen pada masa Bani Umayyah yang berkaitan dengan masa pemerintahan Muawiyah bin Yazid:

1. Stabilitas Sosial Politik

Walaupun masa pemerintahan Muawiyah bin Yazid terbilang singkat, beliau menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan stabilitas politik yang sudah dibangun oleh ayahnya. Salah satunya adalah menghadapi perlawanan internal, termasuk dari kelompok-kelompok oposisi. Untuk itu, Muawiyah bin Yazid menggunakan pendekatan yang lebih moderat dalam menghadapi perbedaan politik di dalam negeri.

2. Pengelolaan Keuangan Negara

Muawiyah bin Yazid mewarisi sistem keuangan yang dirancang untuk memperkuat ekonomi negara, termasuk pajak yang dikenakan kepada rakyat. Dalam praktiknya, Muawiyah berusaha untuk mempertahankan kestabilan ekonomi melalui kebijakan yang lebih moderat. Pada masa itu, kebijakan moneter yang kuat diterapkan, dengan pengelolaan dana negara yang lebih sistematis.

Dengan mengelola keuangan dengan benar kita harus berhati-hati agar memilih dan memilah apakah harta yang kita dapatkan ini dengan cara yang halal atau diridhoi Allah ataukah sebaliknya, dalam hadist disebutkan:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halalkah atau yang haram” (HR Bukhari no. 2083)

Konsep dan praktik manajemen pada masa Bani Umayyah, khususnya di masa pemerintahan Muawiyah bin Yazid, menunjukkan adanya sistem yang terstruktur dalam hal stabilitas sosial politik serta pengelolaan ekonomi. Meskipun masa pemerintahan Muawiyah bin Yazid relatif singkat, penerapan manajemen dalam berbagai aspek pemerintahan memperlihatkan betapa pentingnya pengelolaan yang efisien untuk menjaga kelangsungan kekuasaan dalam dinasti ini.

E. Penerapan Manajemen pada Masa Bani Umayyah

1. Manajemen Pemerintahan

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, terjadi perkembangan positif dalam manajemen pemerintahan, yaitu perluasan sistem administrasi. Karena meluasnya wilayah kekuasaan dan sulitnya komunikasi dengan para gubernur di provinsi, pemerintah menerapkan kebijakan pemberian otoritas penuh, bahkan nyaris mutlak, kepada para gubernur untuk mengelola wilayah mereka.

Sistem *al-diwan* (lembaga/kantor urusan) yang digunakan merupakan adopsi dari Persia. Awalnya, bahasa yang dipakai adalah Yunani dan Persia, namun di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, istilah *diwan* mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. *Diwan* sendiri berarti lembaga, kantor, atau jawatan yang mengurus berbagai urusan negara. Beberapa contohnya meliputi *dīwān al-junūd* (militer), *dīwān al-kharāj* (pajak tanah dan keuangan), *dīwān al-rasāil* (surat-menyurat/kesekretariatan), *dīwān al-khatam* (stempel negara), dan *dīwān al-barīd* (semacam kantor pos). Bentuk-bentuk manajemen Bani Umayyah adalah sebagai berikut (Wulandari 2022:39–40):

- a. Perkembangan manajemen pada era Khulafaur Rasyidin cenderung stagnan, yang disebabkan oleh adanya masalah politik dan persaingan di kalangan para sahabat utama Nabi.
- b. Perseteruan politik memicu timbulnya berbagai pemberontakan terhadap pemerintahan Bani Umayyah, termasuk yang dilancarkan oleh kaum Khawarij dan Bani Abbasiyah (melalui metode dakwah tersembunyi). Meskipun menghadapi perlawanan ini, Dinasti Umayyah tetap mencatatkan beberapa perkembangan.
- c. Di masa Bani Umayyah, manajemen pemerintahan mengalami perluasan signifikan dengan dibentuknya berbagai lembaga, kantor, atau departemen di pusat, seperti yang menangani urusan angkatan perang, keuangan, surat-menyurat/kesekretariatan, otorisasi stempel negara, dan kantor pos.
- d. Setiap gubernur di wilayah diberikan wewenang dan otorisasi penuh, bahkan bersifat mutlak, dalam menjalankan desentralisasi pengelolaan wilayah mereka.

Keputusan ini sangat erat kaitannya dengan salah satu prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol, yaitu Pembagian Kerja (*Division of Work*). Prinsip ini menekankan bahwa penempatan seseorang pada posisi atau jabatan harus didasarkan pada konsep 'orang yang tepat di tempat yang tepat' (*the right man in the right place*), yang berarti sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, bukan semata-mata berdasarkan suka atau tidak suka (preferensi pribadi).

Selain itu, kebijakan yang dilakukan pada zaman Bani Umayyah tersebut juga termasuk dalam salah satu fungsi manajemen yaitu Pengorganisasian (*Organizing*) dalam hal ini Hadist Rasulullah SAW juga sudah dijelaskan mengenai pentingnya tepat sasaran dalam mendelegasikan orang lain yaitu yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قُضِيَ حَدِيثُهُ قَالَ أَتَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضَبِغَتِ الْأَمَانَةُ فَأَنْتَظِرُ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَصَلَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْتَظِرُ السَّاعَةَ

"Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sinan] berkata: telah menceritakan kepada kami [Fulaih]. Dan telah diriwayatkan pula hadits serupa dari jalan lain, yaitu Telah menceritakan kepadaku [Ibrahim bin Al Mundzir] berkata: telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Fulaih] berkata: telah menceritakan kepadaku [bapakku] berkata: telah menceritakan kepadaku [Hilal bin Ali] dari [Atho' bin Yasar] dari [Abu Hurairah] berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" Namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata: "Beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu." dan ada pula sebagian yang mengatakan: "Bahkan beliau tidak mendengar perkataannya." Hingga akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: "Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?" Orang itu berkata: "Saya wahai Rasulullah." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat." Orang itu bertanya: "Bagaimana hilangnya amanah itu?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat." (HR. Bukhari no. 57)"

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadis ini secara konsisten dikaitkan dengan Abu Hurairah dan Sahih Bukhari dalam berbagai sumber yang tersedia. Hadis ini menekankan pentingnya menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Penugasan peran dan tanggung jawab harus didasarkan pada kompetensi dan keahlian individu, yang merupakan aspek kunci dari pengorganisasian.

Menyerahkan tugas kepada individu yang tidak kompeten dipandang sebagai tanda akhir zaman, yang menyoroti konsekuensi buruk dari salah urus dan kurangnya organisasi yang tepat berdasarkan keterampilan dan pengetahuan. Rasulullah SAW sendiri sangat teliti dalam menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya dalam menyelesaikan amanah yang diberikan, terutama dalam tugas memimpin dan mengatur. Beliau menempatkan orang yang tepat pada posisi yang

tepat, yang merupakan karakteristik dari profesionalisme. Memilih bawahan hendaknya didasarkan pada keahlian (*kafa'ah*) dalam urusan tersebut.

F. Manajemen Ekonomi dan Pengaruhnya pada Zaman Modern

Pemikiran ekonomi islam pada masa Bani Umayyah yang diterapkan dalam sistem ekonomi modern

1. Konsep Keadilan Ekonomi

Pada masa Bani Umayyah, distribusi kekayaan didasarkan pada keadilan, di mana pajak seperti zakat, *jizyah*, dan *kharaj* digunakan untuk mendukung kebutuhan sosial dan membantu kelompok rentan. Prinsip ini sekarang diterapkan dalam kebijakan fiskal modern, seperti redistribusi pajak dan subsidi bagi masyarakat miskin. Penerapan Modern: Kebijakan jaminan sosial dan pajak progresif di banyak negara mengikuti prinsip keadilan ekonomi yang mengutamakan pemerataan.

2. Keuangan Syariah dan Prinsip Bebas Riba

Pada masa Bani Umayyah, aktivitas ekonomi dianjurkan untuk bebas dari riba (bunga), mendorong transaksi berbasis kemitraan dan bagi hasil. Prinsip ini kini menjadi dasar dalam sistem keuangan syariah yang berkembang pesat, termasuk di sektor perbankan, investasi, dan pembiayaan syariah.

Penerapan Modern: Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah menggunakan model bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) sebagai alternatif pembiayaan yang bebas dari bunga

3. Pajak dan Kepedulian terhadap Kesejahteraan Publik

Pajak pada masa Bani Umayyah, seperti zakat dan *kharaj*, difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dan mendukung masyarakat miskin. Sistem ini relevan dengan kebijakan fiskal modern, yang memanfaatkan pajak untuk membangun fasilitas publik dan menjaga stabilitas sosial.

Penerapan Modern: Banyak negara menggunakan pajak untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang selaras dengan prinsip pemanfaatan pajak pada masa Bani Umayyah.

4. Transparansi dan Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Bani Umayyah menerapkan sistem administrasi yang ketat dan transparan dalam pengumpulan serta alokasi dana publik. Prinsip pengawasan terhadap pemungut pajak juga diterapkan untuk mencegah korupsi.

Penerapan Modern: Sistem keuangan publik di banyak negara kini diatur dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, seperti melalui audit internal dan eksternal, serta keterbukaan informasi kepada publik.

Pengaruh manajemen Bani Umayyah terhadap pemerintahan Islam zaman sekarang sangat signifikan dan beragam. Salah satu warisan utama adalah sistem administrasi yang terstruktur dan birokratis. Bani Umayyah memperkenalkan departemen-departemen (*diwan*) untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan, seperti keuangan, militer, dan pos. Sistem ini menjadi model bagi pemerintahan-pemerintahan Islam selanjutnya dan bahkan diadopsi oleh banyak negara modern.

Selain itu, Bani Umayyah juga menerapkan kebijakan desentralisasi kekuasaan kepada para gubernur, memberikan mereka otonomi yang luas dalam mengelola wilayah masing-masing. Hal ini relevan dengan konsep otonomi daerah yang diterapkan di banyak negara saat ini. Meskipun Bani Umayyah juga memiliki sisi kontroversial, seperti perubahan sistem kepemimpinan dari musyawarah menjadi monarki hereditas, namun kontribusi mereka terhadap pengembangan administrasi dan manajemen pemerintahan tetap tak terbantahkan. Prinsip-prinsip manajemen seperti pembagian kerja, pendelegasian wewenang, dan pentingnya administrasi yang efisien yang dipraktikkan oleh Bani Umayyah masih relevan dan diterapkan dalam pemerintahan Islam hingga saat ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep dan praktik manajemen pada masa Bani Umayyah, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dinasti ini telah meletakkan dasar-dasar penting bagi perkembangan administrasi negara dalam sejarah Islam. Bani Umayyah melakukan perluasan manajemen pemerintahan dengan membentuk departemen-departemen (*diwan*) yang mengelola berbagai aspek negara, seperti keuangan, militer, dan pos. Kebijakan desentralisasi kekuasaan kepada gubernur juga menjadi langkah penting dalam pengelolaan wilayah yang luas.

Prinsip-prinsip manajemen seperti pembagian kerja, pendelegasian wewenang, transparansi keuangan, dan penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat (*the*

right man in the right place) telah dipraktikkan pada masa ini dan terbukti relevan hingga zaman sekarang. Meskipun terdapat kontroversi terkait perubahan sistem kepemimpinan, kontribusi Bani Umayyah terhadap pengembangan manajemen pemerintahan tetap signifikan dan memberikan pengaruh yang besar terhadap pemerintahan Islam setelahnya dan sistem administrasi modern.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2022). Birokrasi Pemerintahan pada Masa Daulah Umayyah: Studi tentang Diwan dan Perkembangannya. *Jurnal Studi Islam*, 15(1), 45–62.
- Basri, H. (2020). Manajemen: Sejarah dan Penerapannya Dalam Dakwah. *Al-MUNZIR*, 12(2), 277. <https://doi.org/10.31332/am.v12i2.1480>
- Bestari, M. A. A. (2024). Dinamika Kekhalifahan Islam Bani Umayyah di Masa Pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan (661-680 M): Pengaruh Politik, Sosial dan Budaya. *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam*, 1, 910–920. <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi/article/view/2728>
- Chodijah, S., Salsabila, N. M., & Firnandya, T. (2024). Sejarah dan Dinamika Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Daulah Bani Umayyah: Transformasi, Inovasi, dan Warisan Pendidikan. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(3), 327–337. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1031>
- Fayol, H., & Gray, I. (1984). *General and Industrial Management*. IEEE. <https://books.google.co.id/books?id=1B9VAAAAMAAJ>
- Febrianti, M. (2020). Aliran Syiah dan Pemikirannya. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(1), 86–97. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i1.805>
- Hakim, L. (2019). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar bin Abdul Aziz: Analisis terhadap Reformasi Ekonomi dan Implikasinya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3).
- Harahap, M. S. (2020). Sejarah Dinasti Bani Umayyah dan Pendidikan Islam. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 21. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v4i2.86>
- Hidayatulloh, M. H., Ridwan, M., & Khusnuddin, K. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Era Bani Umayyah dan Relevansi dengan Masa Sekarang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 348–359. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2673>

- Hitti, P. K. (2006). *History of the Arabs: Rujukan Induk Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*. Serambi Ilmu Semesta.
- Indah, M., & Gaffar, A. A. (2025). Sistem Ekonomi Bani Umayyah: Perkembangan dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Islam. *Al-Mikhraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(3), 345–361. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6826>
- Lapidus, I. M. (2014). *Sejarah Sosial Umat Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Lestari, D. (2020). Sistem Perpajakan pada Masa Bani Umayyah dan Relevansinya dengan Perpajakan Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 123–140.
- Maulidan, A. C., Rhamadan, F. S., & Rahma, D. (2024). Sejarah Peradaban Bani Umayyah dan Pengaruhnya Terhadap Penyebaran Islam di Nusantara. *Jurnal Artefak*, 11(2), 159. <https://doi.org/10.25157/ja.v11i2.14983>
- Rachman, T. (2018). Bani Umayyah di Lihat dari Tiga Fase. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), 86. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1079>
- Rahmadi, F. (2018). Dinasti Umayyah (Kajian Sejarah dan Kemajuannya). *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 3(2), 669. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.353>
- Rahman, A. (2021). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rusdiono. (2018). Kajian Persoalan Manajemen Pemerintahan Ditinjau dari Aspek Kelembagan. (PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora (e-Journal)), 23(1). <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v23i1.2443>
- Safitri, Y. (2024). Berdirinya Dinasti Bani Abbas. *Jurnal Pendidik Indonesia*, 5(2), 47–53. <https://doi.org/10.61291/jpi.v5i2.51>
- Samsul Munir Amin. (2024). *Sejarah Peradaban Islam*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=bM0cEQAAQBAJ>
- Samsunar, Muh., Sapa, N. B., & Lutfi, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Bani Umayyah: Suatu Tinjauan Sejarah dan Implementasi Kebijakan Ekonomi. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 9(2), 228. <https://doi.org/10.35329/jalif.v9i2.5871>
- Setiawan, A. M. (2020). Transisi Khalifah Umayyah: Dari Muawiyah Bin Abu Sufyan ke Yazid Bin Muawiyah (661-683 M). *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 4(2), 107. <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v4i2.2459>
- Syauqi, A., Kastalani, A., Dhaha, A., Asmawati, & Widuri, H. (2016). *Sejarah Peradaban Islam*. Aswaja Pressindo.

- Tampubolon, M. (2020). *Change Management: Manajemen Perubahan; Individu, Tim Kerja, Organisasi*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Tanjung, A. N. M., Syah, M. R., Aseandi, R., & Wulandari, S. (2023). *Pengantar Manajemen Bisnis Syariah*. Barokah Publisher.
- Tinianus, E., Idami, Z., Maulana, I., & Fathurrahmi. (2021). *Pendidikan Agama Islam: Berbasis General Education*. Syiah Kuala University Press.
- Ummatin, K. (2021). *Peradaban Islam: Penelusuran Jejak Sejarah*. Kurnia Kalam Semesta.
- Wahidah, R., Istibsyaroh, Muhlis, & Hadi, S. (2025). *Refleksi Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam: Daulah Umayyah, Abbasiyah, dan Era Kebangkitan Islam*. Penerbit KBM Indonesia.
- Wulandari, F. (2022). *Manajemen Syariah*. Gerbang Media Aksara.
- Zein, N. (2022). Contribution of the Umayyad Dynasty to the Development of Islamic Civilization (661-750 AD). *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 3(1), 44–56. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v3i1.8532>